



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR  
DI KEC. WIDASARI KAB. INDRAMAYU  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Widasari  
Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
pada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Syekh Nurjati Cirebon**



**Oleh :  
FATHURROHMAN  
NIM : 59310070**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NUR JATI CIREBON  
2013 M/1434 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## IKHTISAR

**FATHURROHMAN**  
**NIM. 593. 100.70**

**: Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam  
Menangani Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus  
di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu  
Tahun 2011-2012)**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, bahwa pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun pernikahan dapat diperbolehkan menurut Undang-Undang jika pernikahan tersebut dilakukan oleh lembaga yang mempunyai wewenang penuh. Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat hukum suatu pernikahan, maka perlu diketahui peran dari lembaga tersebut sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang terkait dengan judul tersebut, yakni: Berapa tingkat perkembangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten indramayu?. Apa penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu?. Bagaimana peran KUA dalam menangani kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu?.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan laju perkembangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Untuk mendeskripsikan sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Untuk mendeskripsikan peran KUA dalam menangani kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis memilih penelitian lapangan (observasi) dengan metode kualitatif sebagai upaya penelitian untuk mendapatkan data deskriptif yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata ataupun lisan yang kemudian dianalisis, namun lebih dahulu melalui editing data dan klasifikasi data, sehingga terlihat permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Widasari Kabupaen Indramayu.

Dari hasil penelitian ini ada beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama* dari hasil penelitian, indikasi laju perkembangan pernikahan di bawah umur dari tahun 2011 s/d 2012 mengalami peningkatan. *Kedua* dari hasil penelitian faktor penyebab pernikahan di bawah umur yang paling dominan adalah hamil sebelum menikah. *Ketiga* peran KUA dalam menangani pelanggaran terhadap Undang-Undang pernikahan di bawah umur, maka KUA mengeluarkan N9, N5 dan N8.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul *“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu (Study Kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012)”* oleh **Fathurrohman**, NIM. 59310070 telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah IAIN SYEKH NURJATI Cirebon pada tanggal 10 April 2013 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu pada Fakultas Syari’ah.

Cirebon, 10 April 2013


### Sidang Munaqosyah

**Ketua,  
Merangkap Anggota**



**H. Ilham Bustomi, M.Ag**  
NIP. 19730329 200003 1 002


**Sekretaris,  
Merangkap Anggota**



**Nursyamsudin, M.A**  
NIP. 19710816 200312 1 002

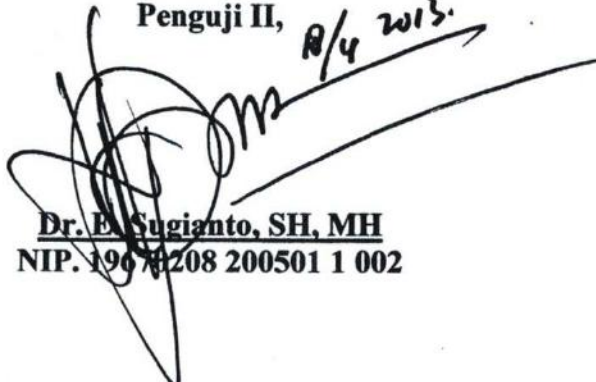
### Anggota

**Penguji I,**



**H. Ilham Bustomi, M.Ag**  
NIP. 19730329 200003 1 002

**Penguji II,** 18/4 2013



**Dr. E. Sugianto, SH, MH**  
NIP. 19641208 200501 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segalapujidansyukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat serta karunia-Nya berupa ide, kesehatan, waktu dan kemudahan yang diberikan-Nya, akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) ini dengan baik, dan lancar.

Shalawat serta salam selalu dan senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruh keluarga, kerabat, sahabat, dan ummat Rasulullah SAW, serta orang-orang yang telah mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman, amin. Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliaha sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Berkenaan dengan penulisan Skripsi ini, penulis telah memperoleh bantuan moral dan material yang berlimpah dan besar sekali manfa'atnya dari berbagai pihak. Untuk itu sudah menjadi keharusan bagi penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, seraya berdo'asemoga Allah swt memberi balasan yang setimpal kepada mereka dan menilainya sebagai amal shaleh yang diridhai-nya. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua saya tercinta: Ibunda Nur Fitnoningsih yang setelah mengandung dan melahirkan penulis bersama-sama ayahanda Syamsuri, mengasuh,





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- membesarkan dan mendidik saya dengan ikhlas, susah payah dan mengorbankan tenaga, pikiran, waktu serta biaya yang tidak sedikit untuk membahagiakan anaknya. Semoga Allah SWT, senantiasa mengampuni dosa dan melimpahkan rahmat-Nya kepada orang tua tercinta.
2. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Maksun Muchtar, M. Ag. selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
  3. Ucapan terimakasih yang sama kepada Bapak Dr. Ahmad Kholiq, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
  4. Ucapan terimakasih yang tulus juga saya sampaikan kepada Bapak H. Ilham Bustomi, M. Ag., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah.
  5. Kepada Bapak DR. H. Munir Subarman, M.Ag., dan Bapak Nursyamsudin, M.A. yang telah memberikan bimbingan terbaiknya atas koreksi dan masukan-masukan yang sangat berharga kepada saya untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.
  6. Ucapan terimakasih juga tak lupa saya sampaikan kepada seluruh dosen dan staff Fakultas Syari'ah yang telah membantu kelancaran perkuliahan saya.
  7. Ucapan terimakasih yang sama kepada Bapak Muhadi, M. Pd.I, selaku kepala KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu beserta para jajaran staffnya.
  8. Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman seangkatan di Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, terhusus



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

kepada“yang ada di hati ”, terimakasih dari hati yang terdalam atas ketulusan dalam memberikan perhatian, pengorbanan, waktu dan pengertiannya.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, meski dengan beberapa ketidak sempurnaan, penulis berharap skripsi ini mampu menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya tentu dengan izin dan ridho-Nya

Cirebon,25 Februari 2013

**Penulis**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Pemikiran .....	13
E. Penelitian Terdahulu .....	16
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	21



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## **BAB II : PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN UNDANG**

### **– UNDANG No 1 TAHUN 1974 .....23**

#### **A. Pernikahan dalam Perspektif Fiqh ..... 23**

##### **1. Pengertian Pernikahan ..... 23**

##### **2. Rukun dan Syarat-Syarat Pernikahan ..... 27**

##### **3. Dasar Hukum pernikahan ..... 31**

##### **4. Tujuan Pernikahan ..... 35**

#### **B. Pernikahan dalam Perspektif Undang–Undang No 1 Tahun 1974..... 39**

##### **1. Pengertian Pernikahan ..... 39**

##### **2. Syarat-Syarat Pernikahan..... 41**

##### **3. Tujuan Pernikahan ..... 51**

## **BAB III : KONDISI OBYEKTIF DAN TUGAS OPERASIONAL**

### **KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN WIDASARI**

### **KABUPATEN INDRAMAYU.....54**

#### **A. Kondisi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widasari ..... 54**

#### **B. Struktur organisasi Kantor Urusan Agama ..... 59**

#### **C. Tugas-tugas Operasional Kantor Urusan Agama..... 69**

#### **D. Faktor Penunjang dan Penghambat Tugas-tugas KUA ..... 73**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

<b>BAB IV</b>	<b>:PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM</b>	
	<b>MENANGANIPERNIKAHAN.....</b>	<b>76</b>
A.	Tingkat Perkembangan Pernikahan di Bawah Umur dari Tahun 2011-2012 .....	76
B.	Penyebab Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Widasari .....	83
C.	Peran KUA dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur .....	85
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A.	Kesimpulan .....	102
B.	Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>104</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Perkawinan adalah suatu Akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *Syara'* untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT telah membimbing manusia menuju fitrahnya. Di antara fitrah itu adalah kecenderungan hidup secara berpasang-pasangan. Dengan bahasa lain, “manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam bahasa al-Qur`an disebut *Azwāj* (berpasang-pasangan).<sup>2</sup>

Satu-satunya jalan yang dibenarkan Agama untuk mewujudkan kecenderungan dan ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya itu adalah dengan menikah.

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, hlm. 12.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 11, hlm. 5398.



Dengan demikian, menikah merupakan jalan yang telah Allah gariskan bagi manusia untuk menuju fitrahnya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1: *Bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan nya.*

Undang-Undang No 22 tahun 1946, tanggal 21 November yang berlaku sejak 2 November 1954 melalui Undang-Undang No 32 tahun 1954, tanggal 26 Oktober 1954 (LN.1954 No. 98), yakni Undang-Undang pencatatan nikah, talak dan rujuk mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di Indonesia bagi orang Islam. Dalam pasal 1 UU No. 22 tahun 1946 ditentukan bahwa:

“ Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya”.

Tugas Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan Agama Islam, untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibagi menjadi 5 bagian garapan:<sup>3</sup>

1. Seksi kepenghuluan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan pemberdayaan kantor urusan Agama.
2. Seksi pengembangan keluarga *sakinah* mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga *sakinah* dan pemberdayaan keluarga terbelakang.

---

<sup>3</sup> Saripudin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004 ), cet. Ke-1, hlm. 165.



3. Seksi produk halal mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
4. Seksi bina *ibadah* sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat *du'afa* dan bantuan sosial keagamaan.
5. Seksi pengembangan kemitraan Umat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan prakarsa di bidang *Ukhuwah Islamiyah*, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah Umat.

Dalam 5 garapan tugas KUA tadi tidak ditemukan tugas KUA yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur dan adanya dispensasi untuk melakukan pernikahan, oleh karena itu penulis menyusun skripsi ini. Karena dalam perkembangannya, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut tercatat dalam pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Terhadap pasal 2 ayat 2 tersebut terdapat 2 macam penafsiran ,yaitu:<sup>5</sup>

1. Pendapat yang memisahkan pasal 2 ayat 1 dengan ayat 2, sehingga perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya, sedangkan pendaftaran hanyalah Syarat administratif. Hal ini

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: ARKOLA, t.t.), hlm. 6

<sup>5</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 46.



menunjukkan bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sudah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.

2. Pendapat yang menyatakan antara pasal 2 ayat 1 dan 2 merupakan satu kesatuan yang menentukan sahny suatu perkawinan. pendapat ini didasarkan pada penafsiran sosiologi dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan.

Adapun akibat dari pernikahan di bawah umur jika ditinjau dari berbagai aspek sangatlah merugikan karena pernikahan tersebut dapat membahayakan kesehatan baik untuk orang tuanya maupun anaknya nanti. Berbagai akibat dari pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Dalam Akibat Hukum

Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang di Negara kita yaitu:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Pasal 7 ayat 1 pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pasal 6 ayat 2 untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.

- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pasal 26 ayat 1 orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

---

<sup>6</sup> Mohammad, M. Dlori. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, (Jogjakarta: Media Abadi, 2005), hlm. 234.





2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat.
3. Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.

## 2. Akibat Biologis

Anak yang masih belum dewasa secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampe hamil kemudian melahirkan, jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang akan luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.<sup>7</sup> Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

## 3. Akibat Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis kepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan, anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pendidikan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan hak-hak lain yang melekat dalam dirinya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>[http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1240:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2:islam-kontemporer&Itemid=57](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2:islam-kontemporer&Itemid=57). di unduh pada tanggal 9 okt 2012.

<sup>8</sup> Mohammad, M. Dlori. *Jeratan Nikah Dini*. . . ., hlm. 50.



#### 4. Akibat Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat *patriarki* yang bias *gender*, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran Agama apapun termasuk Agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan lil 'Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya *patriarki* yang bias *gender* yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

#### 5. Akibat Prilaku Seksual Menyimpang

Adanya prilaku seksual yang menyimpang yaitu prilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah *pedofilia*. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan *illegal* (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan pernikahan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81.

#### **Di samping di atas tadi, masih banyak akibat Pernikahan di Bawah Umur yaitu:**

- 1) Kesehatan perempuan
  - a. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
  - b. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi
  - c. Beresiko pada kematian usia dini
  - d. Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI), ingat 4T
  - e. *Study epidemiologi kanker serviks* : resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun
  - f. Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker *serviks*
  - g. Resiko terkena penyakit menular seksual



- 2) Kualitas anak
  - a. Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri
  - b. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan memiliki kemungkinan 5-30x lebih tinggi untuk meninggal
- 3) Keharmonisan keluarga dan perceraian
  - a. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian
  - b. Ego remaja yang masih tinggi
  - c. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah
  - d. Perselingkuhan
  - e. Ketidak cocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua
  - f. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional
  - g. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi.<sup>9</sup>

Ketentuan-ketentuan yang dibolehkan dilangsungkannya suatu perkawinan diatur dalam pasal 3, 8, 10, 11, 12 PP No. 9 tahun 1975, yakni:<sup>10</sup>

1. Memberi tahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan pasal (3);
2. Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat di kantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan itu (pasal 8);
3. Perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya (pasal 10);

<sup>9</sup>[http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1240:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2:islam-kontemporer&Itemid=57](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2:islam-kontemporer&Itemid=57). di unduh pada tanggal 9 okt 2012.

<sup>10</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-1, hlm. 294-195.



4. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai diharuskan menandatangani Akta perkawinan, yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang beragama Islam (pasal 11);
5. Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perkawinan, kepada mempelai diserahkan kutipan akta nikah atau perkawinan sebagai alat bukti (pasal 12).

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung resiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo atau *compassinate marriage*.

Di samping itu pula, suatu pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur, yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mempunyai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun*”, namun dalam ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No (1) tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) yaitu *adanya dispensasi lain dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita*.<sup>11</sup> Maksud dari pasal ini adalah untuk menjaga kesehatan suami- istri dan keturunan, maka perlu ditetapkan batas-batas umur pernikahan.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Perkawinan. . . ., hlm. 8.



Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui, bahwa Kecamatan

Widasari Kabupaten Indramayu yang terdiri atas 10 Desa diantaranya yaitu:

1. Desa Kasmaran
2. Desa Leuwigede
3. Desa Ujung Pendok
4. Desa Ujungjaya
5. Desa Ujungaris
6. Desa Kongsijaya
7. Desa Widasari
8. Desa Bangkaloa ilir
9. Desa Bunder
10. Desa Kalensari.<sup>12</sup>

Setelah melakukan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah orang yang melakukan pernikahan di bawah umur dari tahun 2011 s/d 2012 masih sering dilaksanakan. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah orang yang telah melakukan pernikahan di bawah umur. Selama penulis meneliti dari hasil observasi, maka terkumpullah jumlah seluruh orang yang telah melakukan pernikahan di bawah umur dari tahun 2011s/d 2012 sebanyak 17 orang, dan mayoritasnya adalah kaum wanita yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur, dengan usia rata-rata 15 tahun,

---

<sup>12</sup> Data yang di dapat dari hasil dokumentasi di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, 2 Maret 2012.





dengan jumlah seluruh orang yang melakukan pernikahan pada tahun 2011 s/d 2012 sebanyak 1030 pasangan.

Dari hasil data pernikahan yang sudah ada, dapat diketahui Peran KUA<sup>13</sup> dalam menangani pernikahan di bawah umur yang cenderung masih terjadi di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Menurut Bapak Muhadi selaku kepala KUA menyatakan bahwa dari pihak KUA sudah melakukan upaya untuk mensosialisasikan kemasyarakatan agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur atau tidak melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan. Dalam upaya mensosialisasikan kemasyarakatan, KUA tidak berperan sendiri, namun meminta bantuan dari pihak-pihak yang sangat berperan di antaranya yaitu meminta bantuan dari pihak penghulu, lebe, dan meminta bantuan disaat rapat-rapat pihak Kecamatan atau Desa.<sup>14</sup>

Di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 BAB IV Tentang persetujuan dan dispensasi usia nikah menyebutkan:<sup>15</sup>

1. Pasal 6 Bahwasanya pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Pasal 7 Apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu)

Tahun, maka harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tuanya.

---

<sup>13</sup> KUA Desa Kongsijaya Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Blok Masjid Miftahul Jannah.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhadi KUA Desa Kongsijaya kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, 2 Maret 2012.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Tentang *Persetujuan Dispensasi Usia Nikah*.



3. Pasal 8 Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (Enam Belas) Tahun, maka harus mendapat dispensasi dari pihak pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 menyebutkan bahwa demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>16</sup>

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan penulis di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten. Indramayu masih didapatkan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur kira-kira 1,7% . Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang batas umur pernikahan dan adanya dispensasi pernikahan. Dalam ayat 1 dan 2 tersebut terdapat kerancuan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis menyusun skripsi dengan judul “**Peran KUA Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur di Kec. Widasari Kab. Indramayu** (Studi Kasus di KUA Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012)”

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Perkawinan. . . ., hlm. 184.



## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **a. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya pembahasan pernikahan di bawah umur, maka agar pembahasan lebih terfokus penulis mengemukakan batasan-batasan persoalan dalam skripsi ini. Secara lebih spesifik penulis hanya membatasi pada masalah peran KUA dalam menangani pernikahan di bawah umur studi kasus KUA Widasari Kabupaten Indramayu.

### **b. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hasil latar belakang tadi, maka perlu di rumuskan permasalahan penelitian tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Berapa tingkat perkembangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu?
2. Apa penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana peran KUA dalam menangani kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten indramayu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembatasan dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan laju perkembangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan widasari Kabupaten Indramayu.



2. Untuk mendeskripsikan sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.
  3. Untuk mendeskripsikan peran KUA dalam menangani kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.
- b. Kegunaan Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan wacana ilmu pengetahuan yang diperlukan serta menambah khazanah kepustakaan untuk kepentingan akademik.
  2. Memberikan pengetahuan tentang peran KUA dan kedudukan Undang-Undang yang ada di Indonesia.
  3. Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi syarat gelar sarjana.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Secara garis besar dalam prakteknya masalah pernikahan di bawah umur masih sering dilakukan oleh banyak pelaku, baik itu di kota maupun di pedalaman Desa. Kebanyakan dari kalangan mereka disebabkan dari kalangan yang ekonomi dan pendidikannya rendah, sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

Para orang tuapun banyak yang menganggap bahwa pernikahan sudah menjadi hal yang biasa, mereka juga beralesan bahwa patokan atau ketentuan minimal umur untuk melakukan pernikahan itu bukanlah suatu hal yang prioritas, karena dalam *fiqih* sendiri hal tersebut tidak dijelaskan secara tegas, di samping hal tersebut mereka tidak memahami tentang batasan umur pelaksanaan pernikahan. Sehingga Undang-Undang



yang telah dibuat sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut sudah ada sejak tahun 1974.<sup>17</sup>

Padahal Islam sudah mengatur tentang pencatatan pernikahan, *nas* yang terkait dengan pencatatan pernikahan yaitu:

1. suruhan agar pernikahan disaksikan.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ. قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ. لَمْ يَخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَصَى مِنْهُمْ إِلَّا قَوْمًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَشْهَدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ.

Artinya: “Dari Imran bin Husain dan Anas dan abi Hurairah adalah mengerjakan hal seperti ini menurut pendapat ahli ilmu dari para sahabat nabi SAW, dan setelah mereka dari para tabi’in serta lain-lainnya. Ia berkata: Tidak ada Pernikahan kecuali dengan adanya beberapa saksi. Mereka tidak berselisih dalam masalah itu dan juga orang-orang sebelum mereka, kecuali ada suatu kaum dari mutaakhirin dari ahli ilmu. Sebenarnya para ahli ilmu berselisih dalam perkara ini, andaikan disaksikan oleh satu orang, maka menurut sebagian besar ahli ilmu dari ahli kufah dan lainnya tidak memperbolehkan pernikahan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi bersama-sama pada saat akad nikah. Sebagian ahli madinah berpendapat jika disaksikan oleh seorang maka itu adalah jaiiz jika hal itu di umumkan dan hal tersebut menurut pendapat Malik bin Anas dan lainnya.”<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Mohammad, M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini*. . . ., hlm. 234.

<sup>18</sup> Abi Hasan Nuruddīn Muḥammad bin ‘Abdil Hādī As-Sanadi, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Al-kutub Al-‘ilmiyyah, 2003), Juz 3, hlm. 35





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kalau dilihat dari nilai Normatif (*'illat*) yang dapat diambil dari kedua *nash* tersebut adalah perlu ada bukti yang menjamin hak para pihak; suami, isteri dan anak-anak kelak.<sup>19</sup>

Sedangkan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi perkawinan di bawah umur antara lain dengan menggunakan cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan cara memberikan ceramah-ceramah tentang perkawinan dalam acara *walimatul 'urush*, pada khutbah jum'at, dan pengajian umum serta meminta bantuan pihak desa pada waktu rapat untuk mensosialisasikannya.<sup>20</sup>

Namun, di Indonesia masih sering terjadi praktek pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan dari tahun 1974 juga tidak tegas melarang praktek itu. Menurut Undang-Undang Perkawinan, seorang anak perempuan baru boleh menikah di atas usia 16 tahun, sedangkan seorang anak lelaki di atas usia 19 tahun. Tapi masih adanya dispensasi dari pengadilan bagi anak yang kurang cukup umur untuk melakukan pernikahan, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) masih sering memberi kelonggaran bagi orang yang mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat.

---

<sup>19</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia +Tazzafa, 2010), hlm. 120.

<sup>20</sup> [http://student-research.umm.ac.id/index.php/department\\_of\\_syariah/article/view/6636](http://student-research.umm.ac.id/index.php/department_of_syariah/article/view/6636)  
diunduh pada hari senin 23 April 2012.



Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan di bawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan di bawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.<sup>21</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur skripsi yang berada di perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, penulis mengambil beberapa skripsi yang ada yang mengenai pembahasan tentang masalah pernikahan usia di bawah umur atau disebut juga nikah muda. Adapun skripsi yang membahas masalah tersebut antara lain:

1. Bumyamka Jaya M, "*Problematika perkawinan usia muda di Kecamatan tarub Kabupaten Tegal (Study kasus di KUA Kecamatan tarub Kabupaten tegal tahun 2009-2010)*" Fakultas Ahwal Al-Syahsiyah Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2010: skripsi ini membahas tentang

---

<sup>21</sup>[http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1240:pernikahan-dini-dalam-perspektif-Agama-dan-Negara&catid=2:islam-kontemporer&Itemid=57](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:pernikahan-dini-dalam-perspektif-Agama-dan-Negara&catid=2:islam-kontemporer&Itemid=57). diunduh pada hari senin 23 April 2012.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

pelaksanaan perkawinan usia muda, yang melatar belakangi perkawinan usia muda berdasarkan hasil observasi di lapangan pada tahun 2009-2010.

2. Abdullah, *“Pengaruh perilaku zinah sebagai faktor yang menyebabkan kawin muda, (Studi analisis di kalangan mahasiswa-mahasiswi Kota Cirebon).* Fakultas Ahwal Al-Syahsiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2005 M/1426 H. Skripsi ini membahas tentang konsep nikah yang benar menurut Agama Islam yaitu melalui pihak wali nikah menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *Syara’* yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan percampuran antara keduanya, dari hasil *regresi* dapat disimpulkan bahwa perilaku zinah berpengaruh terhadap kawin muda.

Perbedaan: pada skripsi di atas, meneliti tentang problematika pelaksanaan dan hal-hal yang melatar belakangi perkawinan usia muda, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia muda.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang peran lembaga KUA dalam menangani pernikahan di bawah umur dan upaya untuk mensosialisasikan kemasyarakatan agar tidak melanggar undang-undang perkawinan yang sudah ditetapkan.



## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif<sup>22</sup> yang bersifat deskriptif, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka, penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data-data faktual yang sifatnya *otentik* di lapangan.<sup>23</sup> Penelitian lapangan biasanya mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan datanya seperti dengan mengambil obyek penelitian lembaga KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, dan fokus studi yang akan dikaji berkisar pada Peran lembaga KUA dalam menangani pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya yaitu KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, alasan memilih tempat tersebut adalah karena prasarana tempat penelitian sangat mendukung, kemudian tempat tinggal penulis pun tidak jauh dari tempat penelitian, sehingga hal ini akan membantu penulis dalam hal menghemat biaya, tenaga dan waktu disamping untuk mempermudah perolehan data.

---

<sup>22</sup> Pendekatan Kualitatif yang bersifat deskriptif adalah untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat tertentu.

<sup>23</sup> Suyadi. *Libas Skripsi dalam 30 Hari*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), cet. Ke-II, hlm. 58.



### 3. Data dan Sumber Penelitian.

#### a. Data penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data sekunder. data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yaitu kepala KUA dan para anggotanya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku makalah-makalah, sumber dari internet serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik judul ini.

#### b. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan adalah sumber lapangan dan sumber skunder. Sumber lapangan adalah data yang dihasilkan dari penelitian langsung di lapangan, Sedangkan sumber sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan sumber hukum primer seperti buku-buku Hukum Perkawinan di Indonesia, Peradilan Agama di Indonesia, *Fiqih Munakah}at, Tafsir Al-mis}bah*, Kemudian hasil penelitian dan literatur lain<sup>24</sup>.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara.

Wawancara mendalam yaitu merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh keterangan data secara lisan melalui Tanya jawab berupa wawancara dengan kepala KUA Widasari Kabupaten Indramayu.

---

<sup>24</sup> Artikel–artikel, Makalah, Dokumen, Asip, Hasil penelitian, Catatan–catatan dan Sumber dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini.





Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang ada.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu beberapa data yang didapat untuk mengolah masalah biasa ditemukan dalam wujud dokumen-dokumen yang berkaitan,<sup>25</sup> seperti arsip-arsip dan termasuk juga mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah, catatan-catatan, kliping, artikel-artikel dan juga sumber-sumber dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

c. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat tertentu.<sup>26</sup> Dari gambaran ini dapat diperoleh data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada, yang pada akhirnya diambil kesimpulan.

<sup>25</sup> Arif Maulana, *Cara Instan Menyusun Skripsi*, (Jakarta: New Agogos, 2012), cet. Ke-1, hlm. 51.

<sup>26</sup> Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2004), hlm.104.



## G. Sistematika Penulisan

Adapun untuk menjaga sistematika penulisan sehingga terfokus pada yang dimaksud, maka penulisan ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dikemukakan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan masalah. Dalam hal ini penulis mengemukakan peran KUA dalam menangani pernikahan di bawah umur. Kemudian dikemukakan mengenai batasan dan rumusan masalah pada proposal ini. Kemudian dijelaskan mengenai tujuan dan manfa'at penelitian, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### BAB II : PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN UNDANG-UNDANG No 1 TAHUN 1974

Berisi tentang pernikahan menurut perspektif fiqh yang meliputi pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, dasar hukum pernikahan dan tujuan pernikahan, serta tentang pernikahan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meliputi pengertian pernikahan, syarat-syarat pernikahan dan tujuan pernikahan.

### BAB III : KONDISI OBYEKTIF DAN TUGAS OPRASIONAL KUA KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU

Dalam hal ini akan mengemukakan hasil penelitian, Kondisi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widasari, faktor penunjang dan penghambat, Tugas-tugas KUA, Tugas-tugas Operasional Kantor Urusan Agama, serta Struktur organisasi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kantor Urusan Agama, dari pembahasan pada bab ini akan diperoleh gambaran terhadap kondisi KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

#### BAB IV : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DI KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU.

Berisi tentang Tingkat Perkembangan Pernikahan di Bawah Umur dari Tahun 2011-2012, Penyebab Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Widasari, dan Peran KUA dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur.

#### BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari data dan kajian yang telah diperoleh, dianalisis yang menjadi pokok permasalahan. selain itu, kesimpulan ini juga disertai saran-saran yang berhubungan dengan kajian ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat 1* . cet. Ke-1. Bandung: Pustaka Setia
- Amin al-Shahir ibn 'Ibidin, Muhammad. T.t. *Hashiyah Radd al-Muhtar*. Vol. II. Bairut: Daral Fikr
- Asnawi, Moch. 1975. *Himpunan Peraturan dan Undng-Undang RI tentang Perkawinan Serta Peraturan, Pelaksanaan*. Kudus: Penerbit Menara
- Dāwud Sulaimān, Abī. 1994. *Sunan Abī Dāwud*. Juz II, Beirut: Daar al-Fikri
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Penerbit Tri Karya
- Eoh, O. S. 2001. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fauzil Adhim, Muhammad. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gama Insani Press
- Ghazalba, Sidi. 1976. *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hasan Nuruddīn Muḥammad, Abī. 2003. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Juz 3. Beirut: Dār Al-kutub Al-‘ilmiyyah
- Hidayatullah, “*Nikah Muda dalam Pandangan Fiqih*”, [http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7826:nikahmuda-dalam-pandangan-fiqih-&catid=68](http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7826:nikahmuda-dalam-pandangan-fiqih-&catid=68)
- <http://kuapasarminggu.blogspot.com/2009/04/prosedur-pernikahan-di-kantor-urusan.html>
- [http://studentresearch.umm.ac.id/index.php/departement\\_of\\_syariah/article/view/6636](http://studentresearch.umm.ac.id/index.php/departement_of_syariah/article/view/6636).



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

[http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1240:pernikahan-dini-dalam-perspektif-Agama-dan-Negara&catid=2:islam-kontemporer&Itemid=57](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:pernikahan-dini-dalam-perspektif-Agama-dan-Negara&catid=2:islam-kontemporer&Itemid=57).

Kamil Muhammad 'Uwaidah, Syaikh. 2006. *Fiqih Wanita*. (Pent. M, Abdul Ghoffar). Cet. Ke-20. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar

Khatib, Al-Syarbaini. 1957. *Mughni Muhtaj*. . Juz III. Mesir: Mushtofa al-Bab al-Halabi Wa Ailaduhu

M. Dlori, Mohammad. 2005. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Jogjakarta: Media Abadi

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Maulana, Arif. 2012. *Cara Instan Menyusun Skripsi*. Cet. Ke-1. Jakarta: New Agogos

Mughni, Ibn Qudamah, 2004. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*. . jilid IV. Jakarta: Penerbit Lentera

Muhammad bin Syihâb Al-Dîn Al-Ramlî. 1983. *Fatâwâ al-Ramlî bi Hâmisy al-Fatâwâ al-Kubrâ al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dâr Al-Fikr

Muthmainah, Mutia. 2008. *Perkawinan Yang di Dambakan*. Jakarta: An-Nur Press

Muzdhar, M. Atho' dan Khairuddin Nasution. 2003. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*. Cet.I. Jakarta: Ciputat Press

Nasution, Khoiruddin. 2010. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia +Tazzafa

Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Nuruddin. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana

Peraturan Menteri Agama R.I. No. 2 Tahun 1990, Tentang *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah*.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Tentang *Persetujuan Dispensasi Usia Nikah*,





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Ramulyo, Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- . 2004. *Hukum Prkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sābiq, Sayyid. 1998. *Fikih Sunnah jilid 6*. (Pent. Moh. Thalib). Cet. Ke-15. Bandung: PT Al-Ma'arif
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia
- . 2001. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Saripudin. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. Ke-1. Bandung: Pustaka bani Quraisy
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana
- Sukandarrumidi. 2004. *Metodelogi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, II*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Suyadi. 2012. *Libas Skripsi dalam 30 Hari*. Cet. Ke-II. Jogjakarta: DIVA Press
- Syaripudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Syaukani, Imam. 2007. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: ARKOLA
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras